

Penyediaan Induk dan Benih Ikan BPBAT Jambi Diapresiasi

Panitia Kerja Sarana dan Prasarana Kelautan Perikanan Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Jambi, Jumat (12/07). Kunjuran ini untuk melihat secara langsung infrastruktur sarana dan prasarana ataupun fasilitas seperti kolam pendederan dan pembesaran, bioflok nila, pabrik pakan, tandon air serta ketersediaan indukan, calon induk dan benih ikan milik BPBAT Jambi dan menyerap aspirasi stakeholder termasuk pokdakan dalam rangka meningkatkan produksi dan kualitas mutu kesehatan ikan air tawar.

Hadir dan turut serta mendampingi antara lain Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, Kepala Stasiun Karantina Ikan dan Mutu Jambi, perwakilan dinas kabupaten/kota se-Provinsi Jambi dan pembudidaya ikan penerima bantuan sarana prasarana budidaya ikan.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, dalam sambutannya mengatakan bahwa BPBAT Jambi memiliki tugas pokok dan posisi strategis untuk mendukung ketersediaan benih, calon induk, dan induk ikan air tawar bagi masyarakat khususnya pembudidaya ikan di pulau Sumatera.

Selain itu, balai ini juga memiliki tugas untuk menyalurkan bantuan-bantuan seperti benih ikan, pakan ikan, sarana prasarana pembenihan kepada unit-unit pembenihan rakyat (UPR) maupun untuk pembesaran, minapadi, budidaya ikan sistem bioflok dan bantuan pendampingan teknis.

“Balai Jambi ini mampu memproduksi berbagai calon induk dan benih ikan seperti nila, baik nila merah maupun JICA atau nila Jepang, patin, gurame, dan

ikan-ikan spesifik lokal seperti jelawat, nilem, semah dan ikan hias seperti botia, arwana Jambi dan super red, maupun ikan Sumatera”, terang Slamet.

BPBAT Jambi kata Slamet, merupakan salah satu UPT air tawar Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan produksi calon induk maupun benih ikan cukup besar seperti benih ikan Nila sebanyak 2.000.000 ekor, mas 1.200.000 ekor dan patin 2.200.000 ekor setiap tahunnya. Distribusi benih ikan tersebut meliputi seluruh Sumatera seperti Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Aceh dan Jambi.

“Selain itu, balai ini juga memiliki pabrik pakan mandiri dengan kapasitas 1 ton per jam, dengan target produksi pada tahun 2019 ini sebanyak 140 ton, sebagian akan diperuntukkan untuk bantuan kepada masyarakat. Dengan adanya bantuan-bantuan seperti pakan mandiri, benih ikan, budidaya ikan minapadi dan bioflok maupun bantuan lainnya dampaknya telah nyata dapat dirasakan”, ujar Slamet.

“Dampak tersebut tampak dari pendapatan rata-rata pembudidaya mengalami kenaikan yakni dari Rp. 3,03 juta per bulan pada tahun 2017 menjadi Rp. 3,39 juta per bulan di tahun 2018 atau naik 8,9 persen. Angka ini menunjukkan bahwa pendapatan pembudidaya ikan jauh lebih besar dibandingkan dengan UMR Nasional sebesar Rp. 2,26 juta”, lanjut Slamet.

“Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) sebagai indikator daya saing pembudidaya ikan juga terus naik menjadi 102 pada bulan Juni 2019 lalu. Angka di atas 100 Ini menunjukkan pendapatan pembudidaya ikan lebih besar dari pengeluarannya. Sedangkan nilai tukar usaha pembudidaya ikan (NTUPi) pada bulan Juni 2019 lalu telah jauh di atas angka 100 yaitu mencapai 114.60 artinya prospek usaha perikanan budidaya semakin membaik dan efisien”, terang Slamet merujuk data yang dikeluarkan BPS.

Sejumlah prestasi yang telah dicatatkan perikanan budidaya terang Slamet, tidak terlepas dari support komisi IV DPR RI sebagai mitra kerja KKP dan juga adanya kerjasama baik dengan pemerintah daerah termasuk provinsi Jambi.

“Atas dukungan Komisi IV DPR RI, baik anggaran maupun dukungan terhadap program-program prioritas yang dilakukan oleh KKP kami ucapkan terima kasih. Begitu juga kepada pemerintah provinsi dan kabupaten yang telah bekerja keras bersama-sama kami untuk pembangunan perikanan budidaya demi kesejahteraan pembudidaya”, ucapnya.

Namun demikian, Slamet menyampaikan bahwa pembangunan perikanan budidaya akan terus dilakukan dan ditingkatkan seiring dengan naiknya target produksi sebagai konsekuensi atas semakin meningkatnya kebutuhan pangan berbasis protein hewani terutama ikan.

“Wilayah kerja balai ini sangat luas yakni se-pulau Sumatera, oleh karena itu kami mengharapkan dukungan dari berbagai pihak khususnya Komisi IV untuk pembangunan instalasi-instalasi pembenihan ikan milik balai guna mendekatkan pusat-pusat perbenihan ke sentra pembesaran ikan milik masyarakat”, kata Slamet.